

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE (2016-2020)

Nadila Aulia Muchlis¹, Syamsu Alam², Diah Retno Dwi hastuti³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
email: naadilaaulia@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
email: alam@unm.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar
email: diah.retno@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) Analyzing the impact of Third Parties (DPK) on the distribution of MSME financing. (2) To analyze the impact of the Capital Adequacy Ratio (CAR) on the distribution of MSME financing. (3) To analyze the impact of Non Performing Financing (NPF) on the distribution of MSME financing. The population of this study is Islamic banking in Indonesia, while the sampling uses purposive sampling, namely, Islamic banks that are included in the BUS category and have accessible financial reports, namely during the period January 2016 to December 2020. Data collection techniques use documentation and literature study. The data analysis technique used was panel data and classical assumption test. The results showed that TPF, CAR, and NPF had an effect on the distribution of MSME financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia with a positive variable coefficient and partially, the three variables had a significant influence.

Keywords: *Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), and Credit Distribution.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Menganalisis dampak Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. (2) Untuk menganalisis dampak *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. (3) Untuk menganalisis dampak *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. Populasi penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia, sedangkan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu, bank syariah yang termasuk dalam kategori BUS dan memiliki laporan keuangan yang dapat diakses yaitu selama periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan data panel dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, CAR, dan

NPF berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan koefisien variabel bernilai positif dan secara parsial, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Penyaluran Kredit

PENDAHULUAN

UMKM telah membuktikan eksistensinya dalam perekonomian global. UMKM mampu bertahan dan tetap stabil selama krisis keuangan tahun 1998, dibandingkan dengan perusahaan besar. UMKM mampu melewati krisis moneter 1997 serta krisis keuangan 2008 yang melanda berbagai negara Eropa dan Asia karena berbagai alasan (Destiana, 2016b).

Sebagian besar UMKM memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak memengaruhi terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Selain itu, mayoritas UMKM tidak memiliki akses pembiayaan pada bank. Efek dari penurunan sektor perbankan dan kenaikan suku bunga memiliki sedikit dampak pada sektor ini. UMKM di Indonesia mengandalkan tabungan sendiri dan memiliki akses terbatas ke perbankan.

Jumlah UMKM terus meningkat, pada tahun 1980 ada 7.000 UMKM. UMKM di Indonesia tumbuh dari tahun ke tahun, mencapai 65 juta pada 2019 dan menyumbang pada PDB sebesar 99,9% dari semua perusahaan di negara ini (sumber: kemenkopukm). Industri ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan penyerapan tenaga kerja.

Pinjaman modal dari bank merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi UMKM saat ini. Suku bunga tinggi dan persyaratan untuk jaminan material yang sulit dipenuhi adalah dua faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. Selanjutnya, bagaimana keuangan terbaik UMKM serta bank Syariah dapat memenuhi kebutuhan mereka juga menjadi sulit dalam kondisi ini.

Sebagai organisasi keuangan dengan tujuan bisnis dan sosial, bank syariah yang lebih baik dapat berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM. Dimana salah satu caranya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman untuk usaha agar masyarakat dapat membangun usaha yang baik, jelas serta halal baik dari sisi manajemen maupun kinerja keuangan. Untuk memastikan UMKM yang

bersangkutan terus berkembang, perbankan syariah tidak hanya harus menyediakan pembiayaan untuk modal usaha, tetapi juga beroperasi sebagai lembaga regulasi dan penasehat.

UMKM merupakan sektor yang dapat dipercaya bagi perekonomian Indonesia karena ruang lingkup usaha yang dominan berada di lingkungan domestik, membuat UMKM jadi salah satu sektor yang dapat diandalkan terutama ketika negara ini bergulat dengan badai krisis keuangan yang menimpa ekonomi global. Oleh sebab itu, para petinggi harus saling mendukung untuk memacu pertumbuhan dalam bisnis. Lantas apa kontribusi industri perbankan syariah terhadap UMKM? Berdasarkan statistik yang dapat diakses publik tentang perkembangan usaha kecil dan menengah, serta mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka sudah seharusnya perbankan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor UMKM, yang mencerminkan situasi mayoritas dunia usaha di sektor ini.

Selama lima tahun terakhir, Bank Umum Syariah (BUS) telah meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor riil Indonesia. Distribusi pembiayaan BUS untuk modal kerja dan investasi jangka panjang berkembang, menurut dua metrik utama yaitu, pertama adalah distribusi pembiayaan BUS untuk modal kerja dan tujuan investasi terus bertambah. Kedua, terhadap distribusi pembiayaan modal kerja dan keuangan investasi BUS pada total kredit Bank Umum untuk modal kerja dan pinjaman investasi terus meningkat.

Pembiayaan perbankan syariah digunakan di berbagai industri, termasuk ritel, jasa, dan perdagangan, serta pertanian dan industri. Dengan 2.881 outlet, perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan nilainya. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 12

Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 12 Bank Umum Syariah. Sektor UMKM mendapat dana BUS dan UUS senilai Rp. 62,236 miliar hingga akhir 2020, menyumbang 16,32% dari total pembiayaan BUS dan UUS ke sektor bisnis.

Menurut Sulastri, (2018) fakta yang terjadi di masyarakat, masalah paling signifikan yang dihadapi UMKM adalah memperoleh sumber daya keuangan. Hal ini karena lembaga perbankan dan kelompok keuangan non-bank tidak dapat menjangkau kelas menengah ke bawah di daerah pedesaan. Risiko, biaya operasi, identifikasi perusahaan, dan kontrol konsumsi kredit yang layak bisnis adalah hambatan utama. Bank Indonesia memberikan Pinjaman Bank Umum atau Pembiayaan serta bantuan guna mendukung perkembangan UMKM. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 sebagai tanggapan atas permintaan bank sentral tersebut. Karena konsentrasi mereka pada keuangan mikro, sehingga Bank Umum Syariah (BUS) memainkan peran yang lebih besar dalam studi ini daripada bank non-UMKM.

Bank Indonesia memberikan wewenang berupa pembiayaan likuiditas terhadap BUS dalam bentuk Pembiayaan Modal Kerja (PMK-BUS) tidak hanya itu, terdapat juga Pembiayaan bagi Pengusaha Kecil dan Mikro (PPKM). Dimana pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan nasabah usaha kecil dan mikro serta menyelaraskan dengan arahan dan target yang diinginkan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dipedesaan (Citra, 2013).

Tabel 1. Jumlah pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha BUS di Indonesia Tahun 2018-2020

Bulan	Tahun (Rp Miliar)		
	2018	2019	2020
Januari	27.911	28.427	31.647
Februari	27.846	28.082	37.404
Maret	28.759	28.398	37.475
April	28.948	29.133	38.743
Mei	29.192	29.985	39.949
Juni	28.137	30.158	35.566
Juli	28.300	29.894	35.522
Agustus	28.697	30.059	34.829
September	29.110	30.457	35.339
Oktober	28.776	30.735	35.131
November	27.656	30.924	35.420
Desember	27.392	32.326	35.579
Jumlah	340.724	358.578	432.604
Rata-rata	28.394	29.882	36.050

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan table 1 jumlah UMKM yang menerima pembiayaan BUS meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya mencapai Rp 358,578 miliar pada 2019, yaitu meningkat sebesar Rp 17,854 miliar dari tahun sebelumnya. Walaupun terjadinya pandemi yang memengaruhi berbagai sektor, namun pada tahun 2020 dana yang tersalurkan kembali meningkat yaitu sebesar Rp 74.026 miliar, hal ini menunjukkan bahwa keuangan UMKM mulai membaik.

Banyak faktor yang memengaruhi distribusi pembiayaan UMKM pada BUS. Studi ini melihat tiga faktor yang memengaruhi kapasitas UMKM untuk mengamankan pembiayaan BUS. Alasan utamanya adalah karena BUS memiliki basis modal yang kecil. 8% dari Asset Tertimbang Risiko (ATMR) merupakan modal yang harus dibayarkan oleh bank. Sebagaimana didefinisikan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15PBI/2008.

Tabel 2. Persentase CAR pada BUS di Indonesia Tahun 2018-2020

Tahun	Persentase
2018	20,39 %
2019	20,59 %
2020	21,64 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, CAR telah meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan substansial terbesar dalam tiga tahun sebelumnya adalah 1,05% pada 2020. Menurut Pratiwi & Hindasah, (2014), Semakin banyak CAR yang bernilai, semakin banyak modal yang dimiliki bank. Jadi, masyarakat menerima peningkatan jumlah pembiayaan, khususnya pembiayaan UMKM.

Selain modal, Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi faktor kunci dalam alokasi pembiayaan UMKM pada BUS. BUS mengumpulkan DPK dalam bentuk rekening tabungan, deposito, dan giro. Sumber dana yang paling penting untuk kegiatan operasional berasal dari masyarakat, dan kemampuan lembaga keuangan untuk membiayai operasional mereka dari DPK, termasuk dalam pembiayaan UMKM, adalah kriteria untuk kinerja mereka.

Tabel 3. Jumlah DPK pada BUS di Indonesia pada Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah (Rp Miliar)
2018	257. 606
2019	288. 978
2020	322. 853

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan table 3, jumlah tahunan DPK naik signifikan pada 2019 menjadi Rp 31,372 miliar, dan kemudian meningkat lagi pada tahun berikutnya menjadi Rp 33,875 miliar. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang tertarik untuk berinvestasi dan menabung dalam dana BUS.

Setiap tahun, pembiayaan UMKM di BUS mengalami peningkatan, karena peningkatan yang cukup besar dalam parameter penentu penyaluran pembiayaan UMKM, seperti CAR dan DPK. Selain itu, pertimbangan tambahan, seperti pembiayaan yang sulit, harus diperhatikan dalam alokasi pembiayaan UMKM. BUS tidak mengalokasikan semua dananya kepada masyarakat dengan cara yang sehat. NPF (*Non-Performing Financing*) adalah istilah yang digunakan di sektor perbankan untuk menggambarkan kredit yang tidak berkinerja seperti yang diharapkan. Jika pembiayaan bermasalah melebihi kapasitas perbankan, maka akan mengganggu profibilitas dari bank itu

sendiri serta memaksa mereka untuk gagal, terutama mereka yang memiliki sedikit aset.

Tabel 4. Persentase NPF pada BUS di Indonesia Tahun 2018-2020

Tahun	Persentase
2018	3,26 %
2019	3,23 %
2020	3,13 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Pada tabel 4. persentase NPF setiap tahunnya mengalami penurunan, walaupun penurunannya sangat rendah yaitu pada tahun 2019 hanya 0,9% dan tahun 2020 sebesar 0,2% namun hal ini tetap berpengaruh positif terhadap besarnya jumlah pembiayaan. Menurut Rina Destiana, (2016) semakin tinggi persentase NPF, bank akan menyalurkan lebih sedikit dana. Sebaliknya jika persentase NPF rendah, bank akan menyalurkan lebih banyak dana.

Terlepas dari kenyataan bahwa bank syariah menawarkan berbagai manfaat dan keuntungan dalam menggerakkan ekonomi, khususnya sektor UMKM, pembiayaan saat ini tidak mencukupi. Bank konvensional terus mendominasi penyaluran pembiayaan di sektor UMKM Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran bank syariah, khususnya di kalangan kelas bawah, sebagai komponen penting dari sektor UMKM. Kedua, bank syariah tidak seaktif bank konvensional dalam menyalurkan pembiayaan. Ketiga, karena mayoritas sektor UMKM berada di daerah pedesaan, rendahnya jumlah bank syariah merupakan hambatan yang cukup besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank Umum Syariah merupakan sebuah lembaga bagian keuangan yang menyediakan pembiayaan yang sesuai aturan islam (syariah), serta layanan pembayaran dan pengiriman uang. Dalam fungsi operasionalnya, perbankan syariah memadukan komponen moral dan bisnis. Perbankan syariah menghilangkan bunga dan menggunakan prinsip bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan. Ketika nasabah meminjam pada bank syariah, maka pihak bank dan pihak nasabah akan melakukan perjanjian di awal dan hal ini dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah.

Berdasarkan konsep tersebut, pihak bank dan nasabah menjalin sebuah kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut dapat saling menguntungkan atau saling kerugian atas bisnis nasabah agar nasabah tidak dirugikan dan baik bank maupun nasabah memiliki rasa keadilan (Destiana, 2016).

Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Selanjutnya berdasar UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa pembiayaan adalah menyediakan uang atau setaranya berdasarkan suatu kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah), dimana pihak lain diwajibkan untuk mengganti kembali apa yang dipinjamkan kepadanya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah yang meminjam uang tunai dari bank syariah akan menandatangani perjanjian dengan bank pada awal pembiayaan yang akan dianggap mengikat kontrak antara bank dan calon nasabah. Perjanjian tersebut menentukan bagaimana bagi hasil akan dihitung dan dibagikan oleh kedua belah pihak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah bisnis yang sering didefinisikan sebagai usaha skala kecil yang menggunakan teknologi konvensional dan dikelola secara sederhana, menurut Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Berdasar Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

a) Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c) Usaha Menengah

Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 5. Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset*	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. Rp 1 Miliar	Maks. 2 Miliar
2.	Usaha Kecil	>1 Miliar-5 Miliar	>2 Miliar-15 Miliar
3.	Usaha Menengah	>5Miliar-10Miliar	>15 Miliar-50 Miliar

Ket: * tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Pembiayaan UMKM

Kredit atau pembiayaan UMKM adalah Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM. Pembiayaan berbasis syariah lebih baik untuk pembiayaan UMKM karena menawarkan prediktabilitas yang lebih besar dan menghilangkan bahaya kenaikan suku bunga. Selain itu, dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah menempatkan fokus yang lebih besar pada keberlanjutan perusahaan daripada agunan, yang merupakan salah satu alasan tingginya persentase pembiayaan bank syariah untuk UMKM. Banyak orang merasa bahwa bank dengan skema bunga tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang merupakan salah satu daya tarik utama perbankan syariah di masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diberikan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian simpanan dalam berbagai bentuk simpanan. Dalam menjalankan operasionalnya, bank harus memiliki dana dan sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh perbankan yaitu diperoleh dari DPK yang bersumber dari masyarakat

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau disebut dengan kecukupan modal, adalah rasio modal yang menilai kapasitas bank untuk memenuhi kewajibannya untuk meminjamkan dana dan secara bersamaan memperhitungkan risiko kerugian karena kegiatan bank (kredit/pembiayaan, surat berharga, tagihan pada bank lain, dan lainnya) untuk dibiayai dari dana modal bank. Semakin tinggi nilai persentase CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit atau pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF)

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. Nilai rasio pada NPF ditujukan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Dimana semakin tinggi persentase rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian yaitu kuantitatif karena didasarkan pada perhitungan numerik atau angka yang dapat dievaluasi untuk sampai pada hasil yang dapat diandalkan. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan melalui penggunaan media perantara (dicatat oleh orang lain) dalam penelitian ini yaitu menggunakan laporan keuangan individu perbankan syariah di Indonesia yang tercatat dalam kategori BUS, kemudian diperoleh melalui website resmi masing-masing perusahaan serta publikasi terkait lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Periode data yang digunakan yaitu data pertiga

bulan (triwulan) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Penentuan Metode Estimasi

1. *Common Effect Model* adalah model data panel yang paling sederhana yang digunakan hal ini karna hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.
2. *Fixed Effect Model* adalah model asumsi jika adanya perbedaan antar individu bisa diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Hal ini berguna untuk mengestimasi data panel dalam model *Fixed Effect* dengan menggunakan teknik variabel dummy untuk melihat perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan dalam budaya kerja, manajerial, dan insentif.
3. *Random Effect Model*, dalam model ini digunakan untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model *Random Effect* memiliki perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms dalam masing-masing perusahaan.

Pemilihan Model Estimasi

1. Uji Chow berguna untuk menguji penentuan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat dalam mengestimasi data panel. Dengan pengujian hipotesis:
$$H_0 = \text{Common Effect}$$
$$H_1 = \text{Fixed Effect}$$
Dalam dasar penolakan pada hipotesis nol yakni dengan menggunakan statistic uji chow, apabila nilai $\text{Prob} < \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya.
2. Uji Hausman ialah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat berguna mengestimasi data panel. Pengujian hipotesisnya:
$$H_0 = \text{Random Effect}$$
$$H_1 = \text{Fixed Effect}$$
Jika nilai $\text{Prob} < \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya.
3. *Uji Lagrange Multiplier* berguna untuk menguji mengetahui apakah model *Random*

Effect lebih baik dari pada metode *Common Effect* (OLS). Penguji hipotesis:

H_0 : Common Effect

H_1 : *Random Effect*

Apabila nilai P value menunjukkan $< 0,5$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect* dan sebaliknya.

Persamaan Regresi Data Panel

Untuk mengetahui bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel *independent* yaitu DPK, CAR, dan NPF terhadap variabel *dependent* yaitu penyaluran pembiayaan UMKM, maka digunakan model regresi data panel yang dirumuskan sebagai berikut:

$$KU_{it} = \alpha + \beta_1 DPK_{it} + \beta_2 CAR_{it} + \beta_3 NPF_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien garis regresi
KU	= Penyaluran Kredit UMKM
DPK	= Dana Pihak Ketiga
CAR	= <i>Capital Adequacy Ratio</i>
NPF	= <i>Non Performing Financing</i>
i	= Perusahaan
t	= Waktu
e	= Variabel Pengganggu (<i>error</i>)

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antar beberapa atau semua variabel *independen* dalam model regresi. Multikolinieritas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel *independen* dinyatakan sebagai kondisi linier dengan variabel lainnya. Artinya jika di antara variabel-variabel bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Apabila pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan *correlation matrix*, jika hasilnya ada yang melebihi dari 0,8 itu menandakan bahwa terjadi multikolinieritas yang serius. Dan jika terjadi multikolinieritas yang serius maka akan berakibat buruk, karena hal tersebut akan mengakibatkan pada kesalahan standar estimator yang besar.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, digunakan metode uji Durbin-Watson (DW). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan nilai uji Durbin-Watson yaitu sebagai berikut :

1. Angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.

c. Uji-t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel *independen* secara parsial terhadap variabel *dependen*. Pengujian menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada $\alpha = 5\%$ derajat kebebasan (*degree of freedom*) atau $df = (n-k)$. Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, atau $sig > \alpha = 5\%$
 H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $sig < \alpha = 5\%$

d. Uji-F (Uji Secara Simultan)

Uji-F menunjukkan apakah semua variabel *independen* yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen*. Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau $sig > \alpha = 5\%$

H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < \alpha = 5\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Uji Chow merupakan suatu pengujian untuk membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) sehingga mendapatkan hasil yang baik antara CEM dan FEM. Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel 4.2 dengan nilai statistik Uji Chow sebesar 0,000 dengan menggunakan tingkat signifikan pada

taraf 5% yang berarti nilai pada Uji Chow < taraf signifikan 5%. Dengan asumsi H_1 diterima dan H_0 ditolak, maka model yang paling tepat digunakan adalah FEM, sehingga dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat dibandingkan dengan CEM.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan suatu pengujian untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) sehingga mendapatkan hasil yang baik antara FEM dan REM. Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 4.2 dengan nilai statistik Uji Hausman sebesar 0,106 dengan menggunakan tingkat signifikan pada taraf 5% yang berarti nilai pada Uji Hausman > taraf signifikan 5%. Dengan asumsi H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka model yang paling tepat digunakan adalah REM, sehingga dapat disimpulkan bahwa REM lebih tepat dibandingkan dengan FEM.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) merupakan suatu pengujian untuk membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) sehingga mendapatkan hasil yang baik antara CEM dan REM. Berdasarkan hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM) pada tabel 4.2 dengan nilai statistik Uji *Lagrange Multiplier* (LM) sebesar 0,000 dengan menggunakan tingkat signifikan pada taraf 5% yang berarti nilai pada Uji *Lagrange Multiplier* (LM) < taraf signifikan 5%. Dengan asumsi H_1 diterima dan H_0 ditolak, maka model yang paling tepat digunakan adalah REM, sehingga dapat disimpulkan bahwa REM lebih tepat dibandingkan dengan CEM

Berdasarkan hasil pemilihan model yang telah dilakukan yang terdiri dari uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*. Maka dapat disimpulkan metode estimasi regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Kesimpulan Pemilihan Model

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1.	Uji Chow	CEM vs FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
2.	Uji Hausman	FEM vs REM	<i>Random Effect Model</i>
3.	Uji Lagrange Multiplier	CEM vs REM	<i>Random Effect Model</i>

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa metode estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Dari hasil yang diperoleh ada dua uji yang menghasilkan *Random Effect Model* yaitu uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*.

Sehingga model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) untuk menganalisis data lebih lanjut dalam penelitian ini. Model ini mengestimasi data panel yang memiliki variabel gangguan dan diduga memiliki hubungan antar waktu dan individu.

Tabel 7. Hasil Estimasi

Variabel Bebas	T H	B	t _{hitung}	Prob.	erUji Asumsi Klasik	
					Multikoli nearitas	Heterokedasti sitas
DPK	+	0,182	15,584	0,000	1,000	0,000
CAR	+	74617	3,321	0,001	1,000	0,306
NPF	+	60031	1,621	0,107	1,000	0,866
Konstanta						-17639
F _{hitung}						84,382
Prob. F _{hitung}						0,000
Adjusted R ²						0,558
Durbin Watson						0,968
DW _{tabel} (dL)						1,738
DW _{tabel} (dU)						1,799
Uji Chow						0,000
Uji Hausman						0,106
Uji LM						0,000
Uji Normalitas						0,000
N						200

Sumber : Data Sekunder Diolah

Keterangan:

TH = Taraf Harapan

Taraf Signifikan = 5% atau 0,05

N = Jumlah Sampel

Berdasarkan hasil regresi data panel yang digunakan, maka persamaan dari penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan UMKM} = -17639 + 0,182 \text{ DPK}_{it} + 74617 \text{ CAR}_{it} + 60031 \text{ NPF}_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui variabel mana saja yang mempunyai pengaruh dan bermakna signifikan terhadap variabel terikat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,182 yang berarti setiap peningkatan DPK sebesar 1% akan menambah penyaluran pembiayaan sebesar 0,182% serta DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan koefisien regresi sebesar 74617 yang berarti setiap peningkatan CAR sebesar 1% akan menambah penyaluran pembiayaan UMKM sebesar

7,4617% serta, CAR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

c. *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Non Performing Financing (NPF) dengan koefisien regresi sebesar 60031 yang berarti setiap peningkatan NPF sebesar 1% akan menambah penyaluran pembiayaan UMKM sebesar 6,0031% serta NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi dan bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel atau tidak. Jika koefisien korelasi antar variabel lebih dari 0,8 atau nilai *Variance Inflation Variable* (VIF) lebih dari pada 10, maka dapat disimpulkan model mengalami masalah multikolinearitas (Gujarati, 2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji multikolinearitas tidak menunjukkan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 9 masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 yang berarti penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel bebas pada penyaluran pembiayaan.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term – ed*) pada periode *t* dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (*t – 1*). Untuk mendeteksi masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 8. Kriteria dan Keputusan Pengujian Autokorelasi (*Durbin-Watson*)

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < DW < DL$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dL < DW < 4$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dL < DW < 4 - DL$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - dU < DW < 4 - DU$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$dU < DW < 4 - Du$

Sumber : Gujarati, 2004.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui keputusan dan kriteria pada hasil uji *Durbin Watson* pada penelitian ini adalah ditolak. Dari hasil uji *Durbin Watson* yang telah dilakukan didapatkan hasil sebesar 0,968, sedangkan *Durbin Lower* (dL) sebesar 1,738 dan *Durbin Upper* (dU) sebesar 1,799 maka dengan demikian tidak terdapat autokorelasi karena kriteria dari nilai *Durbin-Watson* berada diantar angka 0 dan *Durbin Lower* sehingga keputusan ditolak dengan hipotesis terjadi gejala autokorelasi positif.

Karena terjadinya gejala autokorelasi, sehingga dilakukan penyembuhan autokorelasi dengan menggunakan metode diferensi pertama (pembeda pertama), yaitu dengan mengurangi data yang terdeteksi data panel dengan sampel 200 menjadi sampel 188. Selanjutnya berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, dapat diketahui keputusan dan kriteria pada hasil uji *Durbin Watson* pada penelitian ini. Dari hasil uji *Durbin Watson* yang telah dilakukan, diperoleh hasil *Durbin-Watson* sebesar 2,521, sedangkan *Durbin Lower* (dL) sebesar 1,729 dan *Durbin Upper* (dU) sebesar 1,794 maka dengan demikian tidak terdapat autokorelasi karena kriteria dari nilai *Durbin-Watson* berada diantara angka dL dan 4 sehingga tidak ada keputusan dengan hipotesis tidak terjadi gejala autokorelasi positif.

c. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh secara parsial atau menguji keberartian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian secara parsial dengan taraf signifikan sebesar 5% atau tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variabel bebas DPK dengan nilai t_{hitung} sebesar 15,584 dan nilai probabilitas t_{hitung} sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, pada variabel CAR dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,321 dan nilai probabilitas t_{hitung} sebesar 0,001 < 0,05, artinya variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan pada variabel NPF dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,621 dan nilai probabilitas t_{hitung} sebesar 0,107 < 0,05, artinya variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

d. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukan kedalam

model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas pada taraf signifikan 5% atau kepercayaan 95%. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa dengan nilai F_{hitung} sebesar 84,382 dan nilai probabilitas F_{hitung} sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,182 dengan nilai probabilitas t hitung 0,000 yang berarti bila terjadi kenaikan DPK 1% akan diikuti dengan kenaikan pembiayaan sebesar 0,182%. Dengan begitu pengajuan hipotesis yang mengatakan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM adalah diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan DPK selama periode penelitian memengaruhi penyaluran pembiayaan UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan teori pembiayaan yang mengatakan bahwa salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*financing*) adalah modal sendiri, maka semakin besar dana yang terkumpul dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar. Pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan dari pada DPK. Sehingga permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK, karena dengan semakin meningkatnya DPK yang dikumpulkan maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dana yang akan diberikan bank kepada masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Citra (2013) dan Widiwati & Rusli (2020) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Hipotesis yang mengatakan bahwa CAR

berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM adalah diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah CAR selama periode penelitian memengaruhi penyaluran pembiayaan secara signifikan dengan nilai probabilitas t hitung yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini sesuai dengan teori rasio kecukupan modal (CAR) yaitu berpengaruh secara positif terhadap kredit/pembiayaan. Kenaikan dari CAR dapat mengindikasikan bahwa semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank maka semakin sehat bank tersebut dari sisi kecukupan modal, untuk itu bank bisa mengekspansi penyaluran kredit/pembiayaannya. Selanjutnya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Miqdad (2017) dan Mandiri (2017) yaitu berdasarkan hasil regresi data panel, CAR berpengaruh secara positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan NPF selama periode penelitian berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM, dengan nilai probabilitas t hitung yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yang dimana NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM adalah ditolak. Dimana teori NPF yaitu semakin tinggi persentase rasio NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, karena pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan kemungkinan perbankan syariah mengalami kerugian namun tidak terdapat hubungan secara langsung terhadap besar kecilnya nilai penyaluran pembiayaan. Nasabah dapat menilai dari segi manajemen kinerja dari perbankan syariah itu sendiri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015) dan Widiwati & Rusli (2020).

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama DPK, CAR, dan NPF berpengaruh terhadap penyaluran

pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan koefisien variabel bernilai positif dan secara parsial, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel bebas tersebut yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran pembiayaan UMKM adalah variabel DPK. Hal ini dikarenakan DPK merupakan sumber pendanaan yang utama. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh perbankan syariah. Sehingga semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan. Hal ini sesuai dengan fungsi intermediasi perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dengan berupa produk yang ditawarkan bank syariah salah satunya yaitu pembiayaan UMKM

KESIMPULAN

Berdasarkan interpretasi dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dan Pihak Ketiga (DPK) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Simpanan DPK merupakan salah satu sumber dana utama yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Sehingga semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula jumlah yang dapat dialokasikan untuk penyaluran pembiayaan UMKM.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio CAR cukup penting dalam penyaluran pembiayaan karena semakin tinggi kecukupan modal yang dimiliki, maka semakin besar kemampuan bank syariah untuk menanggung risiko pinjaman yang macet. Sehingga besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

3. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan koefisien yang bernilai positif. Namun rasio NPF masih berada di atas batas aman menurut aturan Bank Indonesia dengan manajemen penagihan yang relatif baik sehingga tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah tidak berdampak langsung pada nilai penyaluran pembiayaan UMKM.

SARAN

Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia lebih meningkatkan kualitas dan eksistensinya dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu banyak perbankan syariah saat ini yang mengadakan program pembiayaan untuk UMKM agar dapat memajukan usaha UMKM, dengan begitu jaminan yang diberikan sebaiknya lebih memudahkan para pelaku UMKM karena penyaluran pembiayaan UMKM sudah menjadi kewajiban bagi perbankan syariah dalam menjalankan usahanya. Kemudian terkait penghimpunan dana atau DPK hendaknya semakin ditingkatkan, mengingat variabel ini mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap penyaluran pembiayaan. Salah satu cara meningkatkan DPK yaitu dengan menawarkan produk simpanan yang menarik masyarakat dengan fasilitas dan kemudahannya. Selain itu perbankan syariah disarankan untuk tetap menekan dan menjaga rasio NPF sesuai yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian dengan menambahkan periode dan variabelnya, tidak hanya meneliti pada faktor internal tetapi juga meneliti pada faktor eksternal. Sehingga hasil penelitian akan lebih tepat karena mengingat dunia perekonomian merupakan dunia yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42-47.

- Aprilia, A. S. I., & Safitri, L. (2020). Sistem Perbankan Konvensional Dalam Perspektif Fiqh Muamalat. *Al'adalah*, 23(2), 193–204. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i2.49>
- Bakti, N. S. (2018). Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>
- Citra, C. M. (2013). Pengaruh NPF, DPK, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia. In *International Migration Review* (Vol. 47, Issue 2). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12028/abstract>
- Destiana, R. (2016b). Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i1.444>
- Nurlestari, A., & Mahfud, M. K. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *Diponegoro*
- Pratiwi, S., & Hindasah, L. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return Nn Asset, Net Interest Margin Dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5(2), 192–208. <https://doi.org/10.18196/mb>
- Purnama, A. A. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009.02-2011.12. *Media Ekonomi*, 20, No.3, 1–22.
- Sulastri, D. (2018). *Pengaruh Dna Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017*. 1–163.
- Supardi, S. (1993). Populasi dan Sampel Penelitian. *Unisia*, 13(17), 100–108. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol13.iss17.art13>